
**PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI AMERIKA
SERIKAT DAN INDONESIA**

Rokmini¹, Komarudin Sassi²

rukminir379@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

Istitut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya

ABSTRAK

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan terendah dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan adalah sesuatu yang menyangkut tentang ketentuan-ketentuan pada sebuah pendidikan termasuk yang ada di berbagai negara. Perbandingan pendidikan merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Metode yang digunakan termasuk dalam kategori library research atau penelitian kepustakaan, di mana peneliti mengkaji buku, dokumen, dan juga memanfaatkan jurnal-jurnal penelitian yang tersedia di internet sebagai sumber informasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa content analysis atau analisis isi, yang merupakan pendekatan untuk menganalisis konten teks terkait informasi yang ada. Hasil dari pengkajian literatur yang dilakukan oleh penulis bahwasannya. Sistem pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh aturan konstitusi dalam pelaksanaan pendidikannya sedangkan sistem pendidikan di Amerika Serikat memberikan keleluasaan pada negara bagian untuk melaksanakan sistem pendidikannya. Pendidikan di Amerika Serikat diatur dalam tiga level pemerintahan yaitu lokal, negara bagian, dan pusat. Pada level lokal, dewan sekolah, pengawas sekolah, staf kantor pusat, dan kepala sekolah berperan serta dalam mengatur dan menjalankan sekolah. Distrik sekolah menjalankan perannya dengan pengaturan yang terbatas. Perbedaan batasan usia masuk sekolah dasar juga terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat, di Indonesia batas masuk sekolah dasar negeri adalah 7 tahun, sedangkan di Amerika Serikat batas masuk sekolah dasar adalah 6 tahun. Dalam kurikulum, Indonesia mempunyai kurikulum yang terpusat yang mana pada tingkat pendidikan dasar terdiri dari 10 mata pelajaran ditambah dengan muatan lokal. Sedangkan di Amerika Serikat kurikulum pendidikan dasar mengutamakan softskill dengan 4 mata pelajaran umum yang diturunkan dalam bentuk sub mata pelajaran.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Amerika Serikat, Indonesia.

ABSTRACT

Basic education is education provided at the lowest level of education in the national education system. The education system is something that concerns the provisions of education, including those in various countries. Educational comparison is the total sum of the parts that work together to achieve the expected results based on predetermined needs. The method used is included in the library research category, where researchers study books, documents, and also use research journals available on the internet as a source of information. This research uses data collection techniques in the form of content analysis, which is an approach to analyzing text content related to existing information. The results of the literature review carried out by the author are: The education system in Indonesia is influenced by constitutional regulations in implementing education, while the education system in the United States gives states the freedom to implement their education system. Education in the United States is organized into three levels of government, namely local, state, and central. At the local level, school boards, school supervisors, central office staff, and school principals participate in organizing and running schools. School districts carry out their roles with limited regulation. Differences in the age limit for entering elementary school also occur in Indonesia and the United States, in Indonesia the limit for entering public elementary school is 7 years, while in the United States the limit for entering elementary school is 6 years. In the curriculum, Indonesia has a centralized curriculum which at the basic education level consists of 10 subjects plus local content.

Meanwhile, in the United States, the basic education curriculum prioritizes soft skills with 4 general subjects which are derived in the form of sub-subjects.

Keywords: *Policy, Education, United States, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan elemen yang sangat krusial dalam sistem pendidikan nasional, karena pada jenjang inilah pondasi pertama yang dibangun untuk menciptakan generasi penerus yang kompeten dan berkualitas (Putra et al., 2023). Pendidikan dasar tidak hanya berperan dalam memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini. Pada tahap ini, anak-anak diberikan landasan awal untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sosial, serta emosional, yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam merancang kebijakan pendidikan dasar, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, sejarah panjang pendidikan, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan politik yang berlaku (Suparya, 2022). Kebijakan pendidikan dasar ini mencerminkan prioritas strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, yang tidak hanya dituntut untuk mencapai kecakapan akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kokoh dan etos kerja yang tinggi. Di banyak negara, pendidikan dasar juga berfungsi sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral, norma sosial, dan sikap tanggung jawab yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dasar tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga bertujuan untuk membentuk individu yang mampu berkontribusi positif bagi komunitasnya, serta siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks (Suparya, 2022).

Memahami perbedaan kebijakan pendidikan antar negara menjadi esensial, terutama dalam konteks globalisasi saat ini, di mana negara-negara saling berlomba untuk memperbaiki sistem pendidikan mereka agar dapat menghasilkan generasi yang siap bersaing di tingkat internasional. Melalui kajian komparatif terhadap kebijakan pendidikan dasar di berbagai negara, kita dapat mengidentifikasi keunggulan serta kelemahan dari setiap sistem. Hal ini akan memungkinkan kita untuk mengevaluasi dan mengadopsi praktik terbaik yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri (Chen et al., 2018). Lebih lanjut, analisis perbandingan ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana setiap negara merespon kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman melalui kebijakan pendidikan dasar yang mereka terapkan (Chen et al., 2018). Amerika Serikat dan Indonesia adalah dua negara dengan latar belakang sejarah, budaya, dan kebijakan yang sangat berbeda, yang secara langsung mempengaruhi pendekatan mereka terhadap pendidikan dasar. Di Amerika Serikat, sistem pendidikan dasar menerapkan prinsip desentralisasi yang kuat, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan besar kepada negara bagian dan bahkan distrik-distrik sekolah untuk menetapkan kebijakan pendidikan masing-masing. Dengan otonomi ini, setiap negara bagian dan distrik memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan, kurikulum, dan standar pengajaran berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal. Akibatnya, terdapat variasi yang signifikan dalam penerapan kurikulum, metode pembelajaran, dan standar pendidikan antar wilayah, sehingga pengalaman pendidikan dasar bisa sangat berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Amerika Serikat (Yanuarti et al., 2020).

Selain itu, struktur pendidikan di Amerika Serikat diatur secara bertingkat, dengan tiga level pemerintahan lokal, negara bagian, dan federal yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tersendiri dalam mengelola pendidikan. Pemerintah federal berperan sebagai pengatur kebijakan umum yang bersifat luas, seperti hak-hak dasar siswa dan alokasi anggaran, sementara negara bagian dan distrik sekolah memiliki kontrol penuh atas operasional sekolah, termasuk perekrutan guru, penentuan kurikulum, dan pelaksanaan program-program pendidikan. Fleksibilitas ini memungkinkan inovasi dalam pendekatan pendidikan, di mana sekolah-sekolah dapat

bereksperimen dengan berbagai metode pengajaran yang paling efektif sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di daerah mereka (Yanuarti et al., 2020).

Namun, desentralisasi ini juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Sekolah-sekolah di daerah yang lebih maju secara ekonomi seringkali memiliki sumber daya yang lebih baik, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga pendidik, sementara daerah yang kurang berkembang mungkin menghadapi keterbatasan dalam menyediakan pendidikan berkualitas (Arrosiyd et al., 2024). Meskipun demikian, kebebasan ini memungkinkan sekolah-sekolah di Amerika Serikat untuk lebih responsif terhadap kebutuhan siswa di tingkat lokal, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih fleksibel dan adaptif. Pada akhirnya, kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat bertujuan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk belajar dalam cara yang paling relevan dengan kehidupan mereka dan kebutuhan masyarakat setempat, serta membangun sistem pendidikan yang beragam dan dinamis (Arrosiyd et al., 2024).

Sebaliknya, Indonesia menganut pendekatan yang lebih terpusat dalam pengelolaan pendidikan dasar, di mana kebijakan, standar, dan kurikulum ditentukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam sistem ini, kebijakan pendidikan dasar diatur secara seragam di seluruh wilayah Indonesia, memastikan bahwa setiap siswa, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan, mendapatkan pendidikan dengan standar yang sama. Kurikulum nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh sekolah di tingkat pendidikan dasar. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, dengan memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi atau lokasi geografis, memiliki akses yang setara terhadap pembelajaran berkualitas (Mustafa & Gusdiyanto, 2023).

Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek akademik, seperti penguasaan ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan karakter. Mata pelajaran yang diajarkan mencakup berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan hingga seni dan olahraga, dengan tujuan membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki integritas dan kepribadian yang baik (N. Sari et al., 2024). Pendidikan karakter menjadi salah satu komponen kunci dalam kurikulum ini, di mana siswa diajarkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Ini bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga siap menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat (N. Sari et al., 2024).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan program-program khusus untuk mendukung pembelajaran di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan. Misalnya, program guru garis depan, yang menempatkan guru-guru berkualitas di daerah terpencil, serta penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh untuk mendukung pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Semua upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam pendidikan dasar, terlepas dari lokasi mereka (Hidayah & Rinenggo, 2022).

Dengan pendekatan yang terpusat ini, Indonesia berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan dasar tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif

siswa, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai moral yang penting bagi kehidupan bermasyarakat (Hidayah & Rinenggo, 2022).

Salah satu perbedaan utama yang mencolok dalam kebijakan pendidikan dasar antara Indonesia dan Amerika Serikat terletak pada usia anak mulai masuk sekolah dasar. Di Indonesia, usia masuk sekolah dasar negeri diatur secara ketat oleh pemerintah pusat dan ditetapkan pada usia 7 tahun. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesiapan fisik dan mental yang cukup sebelum memulai pendidikan formal. Sementara itu, di Amerika Serikat, usia masuk sekolah lebih fleksibel dan bervariasi antara 5 hingga 6 tahun, tergantung pada kebijakan masing-masing negara bagian. Beberapa negara bagian bahkan memberikan kelonggaran bagi orang tua untuk memutuskan kapan anak mereka siap masuk sekolah, selama berada dalam rentang usia yang telah ditentukan. Pendekatan ini mencerminkan adanya kepercayaan terhadap perbedaan perkembangan individu di antara anak-anak, serta otonomi lokal dalam pengelolaan pendidikan (Chen et al., 2018).

Selain perbedaan usia masuk sekolah, struktur kurikulum di kedua negara juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia lebih terpusat dan padat, dengan mencakup 10 mata pelajaran inti yang diajarkan secara seragam di seluruh sekolah. Mata pelajaran ini meliputi bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan agama, serta beberapa mata pelajaran lain yang berkaitan dengan pengembangan karakter dan keterampilan dasar. Selain itu, terdapat juga muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing, misalnya pendidikan budaya lokal, keterampilan, atau bahasa daerah. Struktur kurikulum yang komprehensif ini mencerminkan tujuan pemerintah Indonesia untuk memberikan landasan akademik yang kuat sekaligus menanamkan nilai-nilai sosial dan moral yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, kurikulum pendidikan dasar di Amerika Serikat dirancang dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan beragam. Fokus utama pendidikan dasar di Amerika lebih diarahkan pada pengembangan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dengan penekanan yang besar pada penguasaan soft skill seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Di banyak sekolah, pembelajaran juga melibatkan proyek dan kegiatan yang interaktif, bertujuan untuk menstimulasi minat siswa dalam belajar dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia kerja. Di samping itu, kebijakan desentralisasi di Amerika Serikat memungkinkan adanya variasi dalam penerapan kurikulum di masing-masing negara bagian dan distrik, di mana setiap wilayah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan tuntutan masyarakat (D. W. Sari & Khoiri, 2023).

Pendekatan ini mencerminkan perbedaan filosofi pendidikan antara kedua negara. Di Amerika Serikat, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengembangan keterampilan yang dianggap akan membantu siswa dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada keberhasilan mereka di masa depan. Sistem pendidikan Amerika berfokus pada pengembangan individu yang mandiri, kreatif, dan mampu berinovasi, dengan pendekatan yang menekankan pada pembelajaran praktis dan aplikasi pengetahuan (D. W. Sari & Khoiri, 2023). Sebaliknya, di Indonesia, sistem pendidikan lebih menekankan pada pemahaman akademik yang luas, di mana siswa diharapkan menguasai berbagai bidang pengetahuan dengan harapan menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus berkarakter kuat. Kedua pendekatan ini mencerminkan perbedaan prioritas antara membekali siswa dengan keterampilan praktis versus memberikan dasar akademik yang menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap perbandingan kebijakan pendidikan dasar antara Amerika Serikat dan Indonesia, dengan fokus untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta implikasi dari masing-masing sistem pendidikan. Dengan memanfaatkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini akan menggali dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, laporan kebijakan pendidikan, serta dokumen resmi dari kedua negara. Sumber-sumber ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat dan Indonesia dirumuskan dan diterapkan.

Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk mengevaluasi dampak konkret dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap perkembangan siswa, baik dari segi akademik maupun sosial-emosional. Analisis ini juga akan mencakup bagaimana kebijakan pendidikan dasar di kedua negara mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan, termasuk akses pendidikan yang merata, tingkat pencapaian akademik, dan kontribusi terhadap pembentukan karakter siswa. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan meneliti bagaimana setiap kebijakan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan modern, seperti kesenjangan pendidikan, adaptasi teknologi, dan persiapan siswa dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Dengan memahami kelebihan dan kelemahan dari masing-masing kebijakan pendidikan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, untuk mengoptimalkan sistem pendidikan dasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan memahami aspek-aspek ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan mendalam bagi para pembuat kebijakan pendidikan di Indonesia dan negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan reformasi sistem pendidikan. Salah satu fokus utama adalah menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia, khususnya dalam hal memperluas fleksibilitas kurikulum, memperkuat pengembangan keterampilan siswa, serta meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global yang terus berkembang.

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menggali langkah-langkah yang bisa diterapkan guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih holistik. Bukan hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga memberikan perhatian pada pengembangan karakter siswa, peningkatan keterampilan sosial, dan penanaman nilai-nilai penting yang memungkinkan siswa untuk tumbuh sebagai individu yang berintegritas, berdaya saing, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dengan demikian, diharapkan sistem pendidikan yang lebih dinamis ini mampu mempersiapkan siswa secara menyeluruh agar mereka dapat berkontribusi secara positif dalam lingkungan yang semakin kompleks dan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yang didukung dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam perbandingan kebijakan pendidikan dasar

di Amerika Serikat dan Indonesia melalui kajian literatur yang terstruktur dan sistematis. Pendekatan deskriptif-kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam kebijakan pendidikan dasar di kedua negara, tidak hanya dari segi substansi kebijakan, tetapi juga dari konteks sejarah, sosial, dan budaya yang melatarbelakanginya. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada aspek-aspek kebijakan pendidikan yang meliputi kerangka konstitusional, struktur administrasi, kurikulum, serta batas usia masuk pendidikan dasar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis isi (content analysis), yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai sumber tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dikaji meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi kebijakan pendidikan, serta laporan dari lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO, OECD, dan World Bank yang memiliki relevansi dengan pendidikan dasar di kedua negara. Selain itu, data sekunder yang diperoleh dari publikasi pemerintah, lembaga pendidikan, serta hasil penelitian akademis sebelumnya juga dimanfaatkan untuk memperkaya perspektif analisis. Penelitian ini tidak hanya membandingkan kebijakan pendidikan secara umum, tetapi juga mengeksplorasi secara rinci dokumen-dokumen kebijakan yang berlaku di Amerika Serikat dan Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan utama dalam struktur dan implementasi sistem pendidikan dasar di kedua negara.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sistem pendidikan dasar di Amerika Serikat dan Indonesia. Fokus penelitian adalah pada perbandingan kebijakan-kebijakan yang diterapkan di kedua negara dalam berbagai aspek pendidikan dasar. Penelitian ini mencakup analisis terhadap beberapa dimensi utama kebijakan, termasuk struktur administrasi pendidikan, kurikulum pendidikan dasar, batas usia masuk sekolah dasar, serta kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. Di Amerika Serikat, penelitian ini secara khusus menyoroti peran penting yang dimainkan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah lokal dalam sistem pendidikan dasar. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana kebijakan pendidikan dasar lebih dipengaruhi oleh aturan konstitusi yang menetapkan pendidikan sebagai kewajiban negara, dengan kurikulum yang cenderung sentralistik. Pada aspek kurikulum, penelitian ini menelaah perbedaan dalam jumlah dan jenis mata pelajaran yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar di kedua negara. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia lebih terstruktur dan terpusat dengan beberapa mata pelajaran wajib yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sementara di Amerika Serikat, kurikulum lebih fleksibel dan fokus pada pengembangan soft skills melalui pendekatan yang lebih dinamis, dengan variasi yang signifikan antara negara bagian dan bahkan distrik sekolah. Batas usia masuk sekolah dasar juga menjadi salah satu elemen penting yang dianalisis, di mana di Indonesia anak-anak umumnya mulai sekolah pada usia tujuh tahun, sedangkan di Amerika Serikat usia masuk sekolah dasar bervariasi, namun umumnya dimulai pada usia enam tahun.

Data yang diperoleh dianalisis melalui proses perbandingan teoritis dan kebijakan yang berlaku di kedua negara. Lima elemen utama yang dianalisis meliputi: (1) Struktur administrasi pendidikan, yang mengkaji peran masing-masing tingkat pemerintahan (pusat, negara bagian, dan lokal) dalam pengelolaan pendidikan dasar di kedua negara, (2) Kurikulum pendidikan dasar, dengan fokus pada perbedaan dalam pendekatan, jumlah, dan jenis mata pelajaran yang diajarkan, (3) Batas usia masuk sekolah dasar, yang membahas kebijakan usia minimal untuk memasuki pendidikan dasar, (4) Desentralisasi pendidikan, khususnya dalam konteks Amerika Serikat, di mana kebijakan pendidikan dasar lebih bersifat otonom di tingkat lokal, dan (5) Hasil pendidikan, yang mengevaluasi dampak dari kebijakan di kedua negara terhadap

prestasi akademik serta pengembangan karakter siswa. Setiap elemen ini dianalisis secara mendalam untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan mendasar antara kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini juga meninjau bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan di masing-masing negara dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan serta perkembangan moral dan karakter siswa.

Metode library research dipilih karena memberikan landasan yang kuat untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi berbagai dimensi kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat dan Indonesia, serta memberikan perbandingan yang komprehensif antara keduanya. Melalui perbandingan ini, diharapkan akan ditemukan sejumlah wawasan yang dapat berguna dalam merumuskan kebijakan pendidikan dasar di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia, khususnya dengan mengambil pelajaran dari pengalaman dan kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat yang menekankan pada fleksibilitas, desentralisasi, dan pengembangan keterampilan siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan mendalam terhadap kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat dan Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Beberapa aspek utama yang akan dianalisis meliputi pendekatan pendidikan yang diterapkan, struktur dan isi kurikulum, peran pemerintah dalam pengembangan dan pengawasan sistem pendidikan, ketersediaan serta kualitas infrastruktur pendidikan, tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam implementasi kebijakan pendidikan dasar, serta dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan dasar di kedua negara, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraannya. (N. Sari et al., 2024).

1. Pendekatan Pendidikan

Pendidikan dasar di Amerika Serikat dikelola melalui pendekatan desentralisasi, di mana negara bagian dan distrik sekolah memiliki otonomi yang sangat besar dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayah mereka. (Tintigon et al., 2023). Di sisi lain, sistem pendidikan dasar di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental, dengan pendekatan yang lebih terpusat. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berperan besar dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional. (Khaulani et al., 2020).

Namun, meskipun bersifat terpusat, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar memberikan ruang fleksibilitas kepada sekolah-sekolah di tingkat lokal untuk menyesuaikan penerapan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan setempat. (Khaulani et al., 2020).

2. Batas Usia Masuk Sekolah Dasar

Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, kebijakan resmi menetapkan bahwa anak-anak harus berusia 7 tahun untuk dapat mendaftar di sekolah dasar negeri. Penetapan batas usia ini mencerminkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kesiapan siswa sebelum mereka memulai jenjang pendidikan formal. (Diputera et al., 2022). Sebaliknya, di Amerika Serikat, anak-anak diizinkan untuk memasuki sekolah dasar pada usia 6 tahun. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam

menilai kesiapan belajar anak, serta proses perkembangan mereka sebelum memulai pendidikan formal. Di banyak negara bagian, terdapat penekanan yang kuat pada pengembangan awal anak, yang tercermin dalam keberadaan program prasekolah dan taman kanak-kanak. (Muliadi & Nasri, 2023).

Perbedaan dalam batas usia masuk sekolah dasar ini tidak hanya mencerminkan perbedaan kebijakan pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap cara anak-anak dipersiapkan untuk pendidikan lebih lanjut (Chen et al., 2018). Di sisi lain, kebijakan di Amerika Serikat yang memperbolehkan anak-anak masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dapat memberikan peluang lebih awal bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan belajar. (Istiq'faroh, 2020).

3. Kurikulum

Di Amerika Serikat, kurikulum pendidikan dasar tidak diatur secara seragam di tingkat nasional, melainkan dikendalikan oleh masing-masing negara bagian, yang diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan menyesuaikan konten serta metode pengajaran. (Yunitasari et al., 2023). Selain itu, fokus utama dalam sistem pendidikan dasar di Amerika Serikat adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning). Sebaliknya, Indonesia memiliki pendekatan yang lebih terpusat dalam pengelolaan kurikulum pendidikan dasar. Kurikulum yang digunakan di seluruh Indonesia ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (Suparya, 2022).

4. Sistem Evaluasi

Di Amerika Serikat, sistem evaluasi dalam pendidikan dasar merupakan suatu pendekatan yang kompleks dan bervariasi, dirancang untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kemampuan akademik siswa. Sementara itu, sistem evaluasi pendidikan di Indonesia masih sangat tergantung pada ujian nasional dan pendekatan evaluasi berbasis standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ujian nasional, yang biasanya dilaksanakan pada akhir tingkat pendidikan dasar, memiliki tujuan untuk menilai pencapaian siswa secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua siswa di seluruh negeri memenuhi standar pendidikan minimal yang telah ditetapkan. (Putra et al., 2023).

5. Akses dan Kesetaraan

Dalam konteks pendidikan dasar di Amerika Serikat, masalah kesenjangan akses merupakan isu yang cukup kompleks dan signifikan. Ketidaksetaraan ini dapat dilihat dengan jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah yang berada di pusat kota cenderung memiliki sumber daya yang lebih melimpah, fasilitas yang lebih modern, dan tenaga pengajar yang lebih berpengalaman dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah pedesaan. Akibatnya, siswa yang tinggal di daerah pedesaan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Mustafa & Gusdiyanto, 2023). Di Indonesia, situasi akses pendidikan dasar juga menunjukkan kemajuan, tetapi masih terdapat tantangan besar terkait pemerataan pendidikan yang perlu diatasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar, namun tantangan yang dihadapi, terutama di daerah terpencil dan terisolasi, tetap menjadi isu yang signifikan (N. Sari et al., 2024).

6. Peran Pemerintah

Di Amerika Serikat, pemerintah federal memiliki peran yang relatif terbatas dalam hal pengelolaan langsung pendidikan dasar, dengan tanggung jawab utama terkait dengan penyediaan dana dan penetapan kebijakan yang bersifat umum. Salah

satu cara utama pemerintah federal berkontribusi adalah melalui program-program pendanaan seperti Title I, yang dirancang untuk membantu sekolah-sekolah di wilayah yang kurang mampu atau memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam kesempatan pendidikan dengan memberikan dukungan finansial kepada sekolah-sekolah yang berada di distrik yang kurang beruntung secara ekonomi (Chen et al., 2018).

Di Indonesia, pemerintah pusat memiliki peran yang jauh lebih besar dalam pengelolaan dan pengendalian pendidikan dasar. Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pemerintah pusat menetapkan berbagai kebijakan strategis, kurikulum nasional, serta standar pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh sekolah dasar di Indonesia. Peran pemerintah pusat ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan standar pendidikan yang merata di seluruh wilayah, dari kota-kota besar hingga daerah-daerah terpencil di Indonesia (Budiman Akli et al., 2023).

7. Tantangan yang Dihadapi

Di Amerika Serikat, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan adalah adanya ketidaksetaraan yang mencolok dalam kualitas pendidikan di antara berbagai distrik sekolah. Distrik-distrik yang berlokasi di wilayah dengan pendapatan pajak yang tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan, termasuk fasilitas yang lebih lengkap dan modern, peralatan pembelajaran yang memadai, serta tenaga pengajar yang lebih berkualitas dan berpengalaman. (Khaulani et al., 2020). Di Indonesia, tantangan dalam pemerataan akses pendidikan juga sangat signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di banyak daerah terpencil, masih terdapat banyak sekolah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Sekolah-sekolah ini sering kali kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang cukup, laboratorium untuk kegiatan praktik, dan akses terhadap teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. (Muliadi & Nasri, 2023).

8. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan di Amerika Serikat umumnya sangat baik dan berkembang pesat, terutama di daerah-daerah dengan ekonomi yang kuat. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan dan distrik yang kaya sering kali dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang modern dan lengkap, termasuk laboratorium sains yang canggih, ruang komputer dengan perangkat keras dan lunak terbaru, serta fasilitas olahraga yang memadai. Sekolah-sekolah ini juga biasanya memiliki ruang kelas yang dirancang dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung. Fasilitas tambahan seperti pusat bimbingan karier dan ruang seni juga sering tersedia, memberikan siswa akses ke berbagai sumber daya yang dapat memperkaya pengalaman belajar mereka (Yanuarti et al., 2020). Sementara itu, di Indonesia, tantangan dalam infrastruktur pendidikan tetap menjadi isu yang signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Banyak sekolah di wilayah ini yang tidak memiliki fasilitas dasar yang layak, seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan untuk mendukung kegiatan membaca dan penelitian, serta laboratorium untuk praktik ilmu pengetahuan. Kekurangan fasilitas ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada siswa. (Hidayah & Rinenggo, 2022).

9. Pelatihan Guru

Dalam konteks pendidikan di Amerika Serikat, sistem pelatihan guru menunjukkan keragaman yang signifikan, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang berlaku di masing-masing negara bagian. Setiap negara bagian menetapkan persyaratan dan prosedur sertifikasi guru yang berbeda-beda, yang dirancang untuk memastikan bahwa calon guru memiliki pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif. (Budiman Akli et al., 2023). Di Indonesia, pelatihan guru telah menjadi salah satu fokus utama dalam upaya reformasi pendidikan yang lebih luas dan mendalam. Pemerintah menyadari bahwa kualitas guru adalah faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah diperkenalkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme para pendidik. (Diputera et al., 2022).

10. Dampak Sosial dari Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat memiliki dampak sosial yang signifikan dan kompleks, berperan vital dalam pembentukan masyarakat yang plural dan inklusif. Melalui pendekatan yang menekankan penghargaan terhadap keberagaman sosial dan ekonomi, serta pengakuan terhadap perbedaan, pendidikan memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang demokratis dan toleran. (Mustafa & Gusdiyanto, 2023). Di sisi lain, di Indonesia, pendidikan dasar juga memainkan peran yang sangat krusial dalam membangun persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada (N. Sari et al., 2024). Lebih jauh lagi, pendidikan dasar di Indonesia berfungsi sebagai alat yang penting dalam memperkuat kohesi sosial di negara yang sangat beragam ini. Melalui kedua sistem pendidikan ini, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, jelas terlihat bahwa pendidikan dasar memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk masyarakat yang inklusif, toleran, dan saling menghargai. Namun, tantangan yang dihadapi masing-masing negara menunjukkan pentingnya kebijakan yang dapat menjamin akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi semua siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau lokasi geografis mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perbandingan kebijakan pendidikan dasar di Amerika Serikat dan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki sistem pendidikan yang mencerminkan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing. Pendidikan dasar di Indonesia diatur oleh aturan konstitusi yang memberikan pedoman dan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaannya, sedangkan sistem pendidikan di Amerika Serikat memberikan keleluasaan kepada masing-masing negara bagian untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan implementasi pendidikan dasar di kedua negara.

Salah satu perbedaan utama yang teridentifikasi adalah usia masuk sekolah dasar, di mana Indonesia menetapkan batas usia 7 tahun untuk memasuki sekolah dasar negeri, sedangkan di Amerika Serikat batas usia tersebut adalah 6 tahun. Perbedaan ini mencerminkan kebijakan yang berbeda dalam penentuan kesiapan siswa untuk memulai pendidikan formal. Selain itu, kurikulum pendidikan dasar di Indonesia bersifat terpusat, mencakup 10 mata pelajaran ditambah muatan lokal, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang komprehensif. Sebaliknya, kurikulum di Amerika Serikat lebih menekankan pada pengembangan soft skill, dengan penekanan pada 4 mata pelajaran umum yang dibagi menjadi sub-mata pelajaran, memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar bagi siswa untuk mengeksplorasi berbagai minat dan bakat.

Dalam konteks evaluasi dan akses pendidikan, kedua negara menghadapi tantangan yang berbeda. Di Amerika Serikat, kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara komunitas yang beragam secara rasial dan ekonomi, menjadi isu yang signifikan. Program-program seperti Title I bertujuan untuk memberikan dukungan kepada sekolah di daerah berpendapatan rendah. Di Indonesia, meskipun akses pendidikan telah meningkat, tantangan pemerataan pendidikan tetap

ada, terutama di daerah terpencil. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu langkah untuk memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu agar tetap bersekolah.

Dengan demikian, kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan pendidikan dasar, masing-masing dengan kelebihan dan tantangan tersendiri. Sebagai negara yang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, baik Amerika Serikat maupun Indonesia dapat saling belajar dari pengalaman dan praktik terbaik masing-masing untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan pendidikan di kedua negara serta negara lain yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrosiyd, M. I. J., Wijaya, H. S., & Muhtarom, T. (2024). Studi Komparatif Terkait Perbandingan Sistem Pendidikan di Negara Brazil dan Indonesia. *JUPERAN: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 03(01), 180–188.
- Budiman Akli, Komarudin Sassi, & Dwi Noviani. (2023). Komparasi Sistem Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia. *Simpaty*, 2(1), 176–198. <https://doi.org/10.59024/simpaty.v2i1.521>
- Chen, X. X. X., Tsai, M. Y., Wolynes, P. G., da Rosa, G., Grille, L., Calzada, V., Ahmad, K., Arcon, J. P., Battistini, F., Bayarri, G., Bishop, T., Carloni, P., Cheatham, T. E., Collepardo-Guevara, R., Czub, J., Espinosa, J. R., Galindo-Murillo, R., Harris, S. A., Hospital, A., ... Crothers, D. M. (2018).
- Dewi, M. P., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Kompetensi Lulusan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 144–152. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.117>
- Diputera, A. M., Damanik, S. H., & Wahyuni, V. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Prototipe untuk Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24114/jbrue.v8i1.32650>
- Hidayah, E. N., & Rinenggo, A. (2022). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Demokratis di Amerika Serikat. *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 10(2), 10. <https://doi.org/10.61689/waspada.v10i2.354>
- Istiq'faroh, N. (2020). Relevansi Filosofi Ki Hajar Dewantara Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 3(2), 1–10.
- Khaulani, F., Marsidin, S., & Sabandi, A. (2020). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar terkait Standar Isi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 121–127. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.112>
- Muliadi, E., & Nasri, U. (2023). UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Telaah Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Terkait Eksistensi Madrasah Swasta dan Yayasan. *Fikroh; Jurnal Islam*, 7(2), 156–166. <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v15i1.5554>.
- Mustafa, P. S., & Gusdiyanto, H. (2023). Perbandingan Kurikulum Pendidikan Jasmani Antara Indonesia dengan Finlandia: Kajian Review. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 9(2), 117–128. <https://doi.org/10.35569/biormatika.v9i2.1534>
- Putra, I. E. D., Rusdinal, R., Ananda, A., & Gistituati, N. (2023). Perbandingan Kurikulum Pendidikan Indonesia dan Finlandia. *Journal on Education*, 06(01), 7437–7448. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/bjie/article/download/7346/2511/>
- Sari, D. W., & Khoiri, Q. (2023). Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun. *Journal on Education*, 5(3), 9441–9450. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1757>
- Sari, N., Sassi, K., Lintas Timur, J., Ilir, O., & Selatan, S. (2024). Perbandingan Sistem Pendidikan Turki Dan Indonesia. *Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 2, 305–320. <https://doi.org/10.61132/nakula.v2i1.499>

- Suparya, I. K. (2022). Kajian Teoritis Perbandingan Kurikulum IPS di Indonesia dan Amerika. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 141. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v3i2.2478>
- Tintongon, J. Y., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Yanuarti, E., Purnama, D., & Hs, S. (2020). Analisis Perbandingan Pendidikan Multikultural (Indonesia, Amerika, Kanada, Inggris). *Jurnal IAIN Bengkulu*, 19(1), 46–65.
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, arena/konteks, jenis, dan langkah kebijakan pendidikan dasar). *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1506. <https://doi.org/10.29210/020232886>